

JEJAK SEJARAH KERAJAAN NAGE

Oleh:

Fransiskus Xaverius Rema & Maria Y. Wona

Abstract

After the Dutch took control of Nage, this system of government then changed to follow the policy of the Dutch who formed a new system called the *Zelfbestuurende Landschap* which was led by *Bestuurder* who was a King. The leadership structure under the king was the Hamente who was appointed by the Dutch and the Village Head who was appointed by the Hamente Head who came from the aristocrats from the swapraja area. Swapraja region is a region that has the right of self-government known as *Zelfbestuur* during the Dutch colonial period, this region is a form recognized by the Dutch. The status of this area states that the area is led by an indigenous leader who has the right to regulate administrative affairs, law and internal culture. In the period 1912 to 1917, the Netherlands formed 6 *Landschap Bestuur* in the Ngada region, one of which was: Nage was led by Roga Ngole. *Landschap Bestuur* Nage is the essence of this writing, Nage which in the Roga Ngole government there are many changes, both in a more organized social system that has only one leader, namely the King formed by the Netherlands so that all things related to the customary law system and all events in the kingdom can be governed by King. As for the new government structure, the Netherlands, namely the King, was assisted by the Head of Hamente / Head of *Mere*, the Head of the Village who was appointed by Hamente, and the last was Opas who became the king's arm.

Kata kunci: *Sejarah, Kerajaan Nage, Raja Roga Ngole*

A. Pendahuluan

Ekspansi Portugis pada abad ke-16 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque bertujuan untuk mencari serta menguasai sumber rempah-rempah, penyebaran agama Katolik, dan menjajah. Hasrat ekspansi wilayah ini, di dalam khazanah literatur sejarah dikenal dengan semboyan 3G (*Gold, Glory, dan Gospel*). Upaya untuk mencapai target tersebut, maka dilakukan beragam usaha. Usaha yang paling riil melalui jalan penaklukan. Salah satu wilayah yang ditaklukan adalah wilayah Nusa Tenggara Timur.

Wilayah NTT terdiri dari beberapa pulau yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Palue. (<http://id.m.wikipedia.org>). Adapun tujuan utama Portugis datang ke Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah untuk mencari kayu cendana yang menjadi produk unggulan dari wilayah ini, yang menjadi kunci Kerjasama antara Portugis dengan NTT.

Kerjasama ini memicu keinginan dari pihak Portugis untuk memonopoli perdagangan kayu cendana. Ironisnya, “misi” berdagang ini juga dilakukan oleh para misionaris demi menambah keuntungan dalam membiayai berbagai kegiatan penyebaran agama. Informasi mengenai kerjasama perdagangan kayu cendana ini-pun diketahui oleh pihak Belanda dan timbulah keinginan Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah di daerah Nusa Tenggara Timur dan akhirnya terjadi perebutan wilayah antara Portugis dan Belanda yang dimenangkan oleh pihak Belanda.

Terdapat banyak peninggalan oleh Portugis. Salah satunya adalah nama Pulau Flores yang berasal dari bahasa Portugis yang berarti bunga, karena menurut bangsa Portugis karena wilayah ini memiliki keindahan alam diujung Timur pulau ini ditutupi oleh kembang Flamboyan. Pada abad ke 19 dan abad ke-20 Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, segala sistem kehidupan sosial, ekonomi dan politik berubah mengikuti sistem pemerintahan kolonial Belanda serta semua kekuasaan tertinggi dipegang dan diatur oleh pemerintah Belanda. Struktur pemerintahan yang diatur oleh Belanda dengan pemimpin tertinggi yakni seorang Gubernur Jenderal atau *Binenland bestuur, Residen, dan Controleur* serta yang terakhir pemerintahan *Zelbestuur* yaitu kerajaan yang berada diluar struktur pemerintahan kolonial.

Adapun beberapa jabatan yang diberikan oleh pemerintahan Kerajaan Belanda kepada pribumi yakni Pangreh Praja, dalam Pangreh Praja ini merupakan susunan Bupati, Patih, Wadana dan Asisten Wadana. (www.guru.sejarah.com). Sistem pemerintahan dan kekejaman Belanda pun dirasakan oleh rakyat Flores di mana Belanda memiliki pengaruh besar terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik pada tahun 1859 berdasarkan perjanjian Lisbon. (<https://indoprogress.com/2017/02/penjajahan-dan-land-grabbing-sebagai-akumulasi-melalui-perampasan-di-flores/>).

Namun Flores tidak dikuasai secara utuh oleh pemerintah Belanda dimana pada saat itu pemerintah Belanda hanya menguasai Flores dari daerah Bima dari awal abad 19 sampai abad 20. Belanda baru resmi menjajah Flores pada tahun 1917 sampai 1918. Sebelum tahun 1917 dan 1918 Belanda menjalankan politik pembiaraan kepada pihak pribumi oleh para pemimpin aristokrat tradisional, dimana para misionaris Gereja Katolik datang ke Flores sudah sejak tahun 1917 dan menstabilkan birokrasi Gereja di Flores ini. Salah satu taktik mereka untuk mengatur alur kerjasama dengan penduduk di wilayah Flores demi menggapai tujuan utama mereka yakni menguasai Flores dan semua hasil sumber daya alam yang ada. (<https://indoprogress.com/2017/02/penjajahan-dan-land-grabbing-sebagai-akumulasi-melalui-perampasan-di-flores/>)

Awal pemerintahan Belanda di Flores terdapat beberapa hal yang janggal dan membuat mereka terlihat sulit dalam menguasai daerah ini, salah satunya adalah wilayah Flores yang sangat luas. Oleh karena itu, mereka membentuk sistem kerajaan dengan cara memilih seorang pemimpin lokal yang kuat dan memiliki tanah yang luas dan akhirnya mereka membentuk 27 *Landshcap Bestuur* di daerah Flores. (www.mbulinggela.blogdetik.com.)

Salah satu Kerajaan yang dibentuk oleh kolonial Belanda di Flores yaitu Kerajaan Nage atau *Zelfbestuur Nage*. Rakyat yang pada saat itu hidup berkelompok yang tidak terstruktur dan tanpa pemimpin yang lebih tinggi struktur sosialnya dalam bahasa Nage disebut *Ulu Eko, Ili Woe* dan *Bo'a Ola* berubah menjadi sebuah wilayah yang terstruktur dan dipimpin setelah kedatangan bangsa Belanda yang membentuk sebuah *Zelfbestuur Landschap* yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut *Zelfbestuurunder* (www.Sultanisasiindonesialog.com).

Pemerintah kolonial memilih *Zelfbestuurunder* Nage yaitu *Oga Ngole*, berdasarkan keputusan dalam dokumen *Korte Verklaring* yang berisikan keputusan pemerintah 28 November 1917 N0.57 awalnya diabaikan namun pada tanggal 18 Agustus 1918 *Korte Verklaring* berlaku dan *Oga Ngole* mulai menjalankan tugas pemerintahannya. Penulis mengambil topik Sejarah Pemerintahan Raja Oga Ngole di Kerajaan Nage Tahun 1918 sampai pada Tahun 1928 ini didasarkan oleh sebuah prinsip keingintahuan penulis mengenai kehidupan sosial nenek-moyang pada zaman penjajahan pada masa pemerintahan Raja Oga

Ngole dan peran raja dalam memerintah kerajaan kecilnya yang pada saat itu pola pikir masyarakat masih sangat primitif.

Pentingnya mengangkat masalah ini, peneliti merasa sebagai penerus bangsa harus mengetahui sistem sosial, politik, serta adat istiadat pada masa lampau yang dianut oleh nenek-moyang di Kerajaan Nage yang memiliki banyak perbedaan dengan kehidupan di zaman modern ini. Dari paparan permasalahan di atas, maka peneliti merasa termotivasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai Sejarah Pemerintahan Raja Oga Ngole Pada Kerajaan Nage Tahun 1918-1928 di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kecamatan Boawae sebagai pusat dari Kerajaan Nage yang menjadi wilayah pemerintahan Raja Oga Ngole pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dengan berbagai perubahan tatanan kehidupan yang harus dialami oleh masyarakat Nage setelah dipimpin oleh seorang raja.

Adapun beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam permasalahan pokok studi ini adalah; (1) Bagaimana kondisi kerajaan Nage sebelum masa pemerintahan raja Oga Ngole yang meliputi sejarah kerajaan Nage, struktur birokrasi kerajaan Nage, dan stratifikasi sosial masyarakat kerajaan Nage ? (2) Bagaimana kondisi kerajaan Nage pada masa pemerintahan raja Oga Ngole yang mencakup Sejarah proses kedatangan bangsa Hindia Belanda ke Kerajaan Nage, kebijakan-kebijakan raja Oga Ngole dalam bidang politik, sosial, pendidikan, kemiliteran dan penyebaran agama serta biografi raja Oga Ngole.

Batasan spasial studi ini mencakup lokalitas Kelurahan Natanage terutama wilayah ibukota Kecamatan Boawae sendiri lebih khususnya kampung adat Boawae. Perodesasi yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yakni pada tahun 1918-1928, pada periode ini terjadi suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nage. Selama periode ini terjadi banyak perubahan yang menantang bagi masyarakat, dimana pada saat tersebut Belanda sudah menguasai wilayah pulau Flores dan membentuk berbagai *Zelfbestuur* atau kerajaan kecil dan salah satunya mereka membentuk Kerajaan Nage dengan menunjuk Oga Ngole atau Roga Ngole sebagai raja. Pada tahun tersebut pun banyak terjadi perubahan-perubahan baru dalam kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Tahun 1918 merupakan periode awal pemerintahan Raja Oga Ngole berdasarkan keputusan dalam dokumen *Korte Verklaring* oleh pemerintahan Belanda 3 Agustus 1918

No.5477/15, dengan dikeluarkan keputusan dalam dokumen ini maka Oga Ngole atau Roga Ngole mulai menjalankan pemerintahannya di Kerajaan Nage, walaupun *Korte Verklaring* No.57 yang sah diabaikan pada tanggal 28 November 1917. Pada masa pemerintahannya dan perlahan-lahan merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih terstruktur. Tahun 1928 digunakan sebagai batas akhir penelitian ini karena pada tahun ini Oga Ngole mengakhiri masa pemerintahannya di Kerajaan Nage dan pemerintah Belanda menunjuk putranya Joseph Juwa Dobe Ngole sebagai raja Nage sekaligus Raja Nagekeo karena adanya penggabungan antara Kerajaan Nage dan Kerajaan Keo.

B. Metodologi

Langkah pertama adalah mengumpulkan sumber (heuristik) (Sardiman, 2004:101). Sumber-sumber yang dikumpulkan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder digunakan dalam penelitian ini buku-buku yang diperoleh dari berbagai perpustakaan. Adapun sumber primer yang digunakan berupa arsip tulisan mengenai Kerajaan Nage yang terdapat pada kantor Camat Boawae. Dalam pengumpulan sumber ini juga menggunakan sumber lisan yakni diperoleh dari warga Kecamatan Boawae khususnya warga Kampung adat Boawae, baik keluarga dari Raja Oga Ngole maupun warga yang berada pada kawasan pemerintahan Raja Oga Ngole.

Langkah kedua adalah kritik sumber atau verifikasi. (Nugroho Notosusanto. 2006:35). Sumber yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikritik baik secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern dilakukan terhadap bahan material dokumen, seperti pada kertas dan tinta yang digunakan, sehingga diperoleh kepastian bahwa bahan tersebut benar berasal dari zamannya atau sezaman (asli). Setelah ditemukan otentitas, dilanjutkan dengan kritik intern yang mengacu pada kritik isi dokumen.

Langkah ketiga ialah interpretasi. (Nugroho Notosusanto. 2006:101). Interpretasi adalah mengambil makna yang saling berhubungan dari data sejarah setelah diterapkan kritik ekstern dan intern. Tahap interpretasi dibagi menjadi 2 langkah yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Pada tahap analisis ini peneliti berupaya menafsirkan isi sumber yang mengandung makna, kemudian makna yang terkumpul disatukan menjadi fakta yang akurat. Seorang sejarawan juga mengembangkan imajinasi sejarah dalam menggabungkan

fakta yang tersendiri dengan warna tersendiri dalam penulisan tersebut. Imajinasi merupakan sisi terpenting dalam melakukan sintesa.

Langkah keempat rekonstruksi historiografi (penulisan) sejarah yang merupakan hasil akhir dari kerja seorang sejarawan. Pada tahap ini fakta disintesakan dalam bentuk tulisan ilmiah dan berdasarkan bukti-bukti yang dinilai akurat. Karya sejarah yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan alam meneliti sumber sejarah dan memunculkan faktanya, melainkan juga membutuhkan imajinatif untuk menguraikan kisah historis secara terperinci. (Palmer, 2003:35.).

C. Pembahasan

1. Sejarah Kerajaan Nage

Penelusuran mengenai wilayah Boawae yang dikenal sebagai wilayah swapraja Nage dapat kita temui pada masa kedatangan bangsa Hindia Belanda sekitar 1909. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagekeo.) Walaupun sebelumnya terdapat tata pemerintahan atau administrasi pemerintahan tradisional (berdasarkan hukum adat), akan tetapi catatan valid dalam bentuk naskah akademik tentu tidak mudah ditemukan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagekeo.) Sumber-sumber tertulis dari dalam wilayah Nusa Tenggara Timur sampai kedatangan bangsa barat hampir tidak ditemukan, karena wilayah NTT yang terdiri dari berbagai suku bangsa tidak mengenal tulisan daerah. (Widiyatmaka, dkk, 1977:36.)

Kecuali melalui suatu penelitian sejarah yang mendalam, terpadu dan komprehensif, hal tersebut dikarenakan tradisi lisan (dalam kajian antropologis) lebih merupakan ciri yang paling menonjol dalam komunitas masyarakat. Sebelum kedatangan kolonial Belanda ke wilayah Flores, masyarakat Nage hidup secara berkelompok dalam “*ulu eko*”, “*ili woe*”, “*boa ola*”, yang bersifat otonom dan tidak ada struktur yang lebih tinggi di atasnya. (<https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/flores/nagekeo-kerajaan/>). Bentuk kepemimpinan pada masa prasejarah sulit dipastikan, karena terbatasnya peninggalan dan sumber-sumber yang ada, diduga kepemimpinan pada masa itu adalah muncul dari keluarga yakni dari anggota keluarga yang memiliki pengalaman lebih, berprestasi serta berdasarkan tingkat usia memiliki tempat yang khusus, terutama apabila mereka lebih lama tinggal ditempat yang bersangkutan. (Widiyatmaka, dkk, 1977:28.) Seiring berjalannya waktu mereka lama-lama

dapat bertindak sebagai pemimpin bukan hanya dalam keluarga kecil, akan tetapi mencakup keluarga yang lebih luas, sehingga pemimpin-pemimpin ini tumbuh sebagai pemimpin-pemimpin suku atau klan-klan. (Widiyatmaka, dkk, 1977:28.)

Kepemimpinan ini disamping bersifat keluarga, juga dalam artian ekonomi dan kepercayaan karena antara faktor ekonomi, kekeluargaan dan kepercayaan memiliki kaitan yang sangat erat. Sejarah mengenai kepemimpinan tradisional Nage pun tercatat bahwa sebagaimana masyarakat pada umumnya, masyarakat adat Nage pada dasarnya adalah kumpulan individu. Di Nage kumpulan individu ini secara genealogis menghimpun diri dalam “*sa’o*” (rumah/rumah tangga) yang bukan saja bermakna bangunan rumah melainkan kumpulan beberapa individu dengan satu kepala keluarga.

Ungkapan adat untuk *sa’o* ini disebut dengan beberapa istilah: *toko teda li’e sa’o* (orang yang tinggal dalam satu rumah), kemudian berkembang menjadi “*sa’o meze teda lewa*” (keluarga besar yang digambarkan dengan rumah yang luas dan balai-balai yang panjang). <http://cylbauengo.blogspot.com/2016/12/peo.html>. Kumpulan *sa’o* membentuk “*woe*”/*hoga/suku*, istilah ini digunakan untuk kelompok genealogis yang sama-sama memiliki “*sa’o waja*” (rumah adat), “*buku gua*” (ritual adat). Orang Nage adalah kelompok para petani, peternak, dan pemburu yang mendiami sejumlah desa di bagian tengah pulau Flores sebuah pulau di kawasan Timur Indonesia. (Forth, 2010:3).

Dalam arti yang spesifik nama Nage menunjukkan orang-orang yang tinggal di wilayah yang mereka sebut dengan “tiga desa Nage” yang meliputi Nata Nage, Nage Sapadhi dan Nage Oga. (Forth, 2010:3). Dasar yang kuat tentang hal ini adalah hadirnya anggota klan Deru atau yang lebih tepat adalah Deu, yang dulu merupakan warga sebuah desa yang tinggal di tempat ini termasuk para penguasa Nage yang juga termasuk klan Deu. (Forth, 2010:3). Nama Nage berhubungan khusus dengan sebuah pohon asam (*Nage, Tamarindus Indica*), sehingga ada tiga desa yang menggunakan label etnik Nage melarang pembakaran pohon asam sambil mengingatkan bahwa ketentuan dari pelanggaran pembakaran pohon asam akan mengakibatkan luka-luka di wajah. (Forth, 2010:3)

Filosofi tentang Nage, menurut narasumber menyatakan bahwa Nage (asam, *Tamarindus Indica*) merupakan sebuah pohon yang memiliki akar dan batang yang kuat serta ranting yang fleksibel atau lentur. Hal ini berkenaan dengan kehidupan masyarakat Nage dimana orang Nage memiliki prinsip hidup yang kuat yang tidak mudah dipatahkan

namun hubungan antara mereka sangat fleksibel tidak ada kesenjangan diantara anggota masyarakatnya. Berbeda dengan *Ki Hele* (alang-alang) yang selalu mengikuti arah angin, jika angin bertiup ke Timur alang-alang tersebut dengan lembutnya mengikuti arah angin ke arah Timur dan begitupun ke arah lain, *Ki Hele* ini menunjukkan pada jati diri seseorang yang tidak memiliki prinsip dalam hidup.

Sebelum kedatangan kolonial Belanda, klan-klan atau *woe* di wilayah sudah mengenal seorang pemimpin bagi Klan mereka yang tidak dipilih, namun diakui oleh anggota klannya untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini dikenal dengan istilah *Mosa Kisa* yang diartikan sebagai seorang yang adil, arif, bijaksana dan mampu memperhatikan rakyatnya. Sistem kepemimpinan tradisional Nage disimbolkan dengan adanya *Peo*, terdapat 5 suku di pusat Kerajaan Nage yang dipersatukan dalam *Peo Oko Nabe Fa* artinya *Peo* yang satu dan *Nabe* yang sama.

2. Kebijakan-Kebijakan Raja Oga Ngole

Kebijakan raja Oga Ngole pada masa pemerintahannya, dijalankan berdasarkan kebijakan dari Hindia Belanda berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan Belanda yaitu *Korte Verklaring*. Dapat dikatakan bahwa hal penting dalam perjanjian plakat pendek ini adalah pelaksanaan kekuasaan secara sepihak dan penyeragaman hubungan dengan para penguasa pribumi. (Ardhana,2008: 88).

Perjanjian Plakat Pendek yang ditandatangani oleh hampir seluruh pemimpin di Indonesia ini, menyatakan pengakuan terhadap kekuasaan Belanda dan juga hubungan kekuasaan langsung secara keseluruhan. (Ardhana, 2008:88). Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu, kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi administratif pemerintahan yang berlaku di Indonesia. (<https://media.neliti.com/media/publications/12292-ID-corak-budaya-birokrasi-pada-masa-kerajaan-kolonial-belanda-hingga-di-era-desentralisasi>). Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjwai sistem birokrasi pada era kerajaan. Pemerintah Kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya.

Motif utama pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka berupaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan. Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan, di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (*Binnenlandsche Bestuur*) yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi moderen, sedangkan pada sisi lain, sistem administrasi tradisional (*Inheemsche Bestuur*) masih tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. (<https://media.neliti.com/media/publications/12292-ID-corak-budaya-birokrasi-pada-masa-kerajaan-kolonial-belanda-hingga-di-era-desentralisasi>).

Kebijakan-kebijakan umum yang dijalankan oleh raja Oga Ngole pada masa pemerintahannya disesuaikan dengan kebijakan Belanda, dalam bidang politik terdapat struktur pemerintahan baru yang berbeda dengan sistem tradisional yakni Kerajaan dengan pemimpin tertinggi yaitu raja, Kepala Hamente yaitu kepala dari wilayah-wilayah kekuasaan raja, Kepala Kampung yaitu para pemimpin setiap kampung, dan yang terakhir adalah Opas yaitu perpanjangan tangan dari raja.

Alur Struktur Kerajaan:

(sumber: Dinas Kearsipan Ngada)



Kebijakan dalam bidang sosial yang dilakukan oleh Raja Oga Ngole adalah Sang raja menjalankan roda pemerintahannya menurut kebijakan dari Hindia Belanda namun, Ia tidak melupakan sistem kehidupan sosial tradisional dimana hukum adat dibicarakan secara jelas dan sempurna serta pembagian wilayah kekuasaan terbagi dalam *Peo Oko Nabe Fa*. Sebelum adanya penggabungan dengan *Keo*, wilayah kerajaan Nage terdiri dari 10 Hamente yakni:

- 1) Hamente Boawae yang dipimpin secara berturut-turut oleh Alexandr Meze Muku, Yosep Sekke Liu dan H. Watu Mite.
- 2) Hamente Kelimado yang dipimpin oleh Cons. Meze Laki.
- 3) Hamente Deru Rowa dipimpin oleh Wilhelmus Roga Wona.
- 4) Hamente Ndora dipimpin oleh Stanis Roga.
- 5) Hamente Raja dipimpin oleh Lambertus Tage Nenu dan Pit Dapa Wea.
- 6) Hamente Munde dipimpin berturut-turut oleh Djo Muku dan Zakarias Dhiga Rio.
- 7) Hamente Mbay dipimpin oleh Said Mane Tima.
- 8) Hamente Rendu dipimpin berturut-turut oleh Belita Owa dan Laurensius Dala.
- 9) Hamente Nataia dipimpin oleh B. Jera Nono.
- 10) Hamente wolowae dipimpin oleh Yoseph Mesa Dhae.

Berdasarkan data Profil Kecamatan Boawae terdapat juga beberapa wilayah kampung berdasarkan kehamentean khusus Nage yaitu:

Hamente Boawae di Jabat oleh : - Joseph Seke Liu, Arnoldus Meze Muku, Karolus Roga Ngole dan Hendrikus Mite dan membawai 13 buah anak kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung sebagai berikut :

Nama Kampung	Nama Kepala Kampung
KampungToeteda/Nagemi	Servasius Bhugu Da
Kampung Boawae	Titus Lasa
Kampung Olakile	Kornelis Kota Kile
Kampung Wolowawo	Marthinus Goa Mola
Kampung Tibakisa	Matheus Mite Wula
Kampung Wolopogo	Andreas Meze Nuwa
Kampung Rega	Zakarias Mite Nage
Kampung Watugase	Alfonsius Su Woi
Kampung Gero	Laja Bo
Kampung Dhereisa	G. Gelo Muku
Kampung Alo	Dhae Dora
Kampung Sekojawa	Kolo Nenu
Kampung Rebhebawa	Rafael Rebo

Kebijakan Raja Oga Ngole dalam bidang pendidikan dapat ditelusuri melalui kebijakan pendidikan formal di Nage dan dirikannya sebuah sekolah yaitu SRK Boawae. Dikisahkan bahwa kedua Putri Roga Ngole menjadi murid pertama di sekolah tersebut

dengan nama Maria Margaretha Boedjoe dan Khatarina Ngoe. (Dopo, dkk. 2015: 48.) Bukti berdirinya SRK Boawae yang sekarang dikenal dengan SDK Boawae, ditetapkan Badan Pengurus Yasukda dalam Keputusan Nomor Ksr. 024.5/23/133/1991, tanggal 5 Agustus 1991 tentang Pendirian Sekolah Dasar dan Penyelenggaraan Yasukda menetapkan tanggal 1 Agustus 1913 sebagai tahun berdirinya SRK Boawae. (Dopo, dkk. 2015: 47.)

Adapun guru pertama yang mengajar di sekolah ini adalah Petrus Claver Diaz. Pada tahun 1915 datang guru kedua yaitu Laurens da Costa, 1916. Selanjutnya, datang guru ketiga yang merupakan pindahan dari SRK Kota yaitu Towari. (Dopo, dkk 2015:48.)

Dalam kaitannya dengan sekolah di Boawae menurut Bapak Benediktus Tai (alm) seorang guru, bahwa sekolah sebenarnya sudah ada pada tahun 1912 akan tetapi Akte sekolah keluar setelah tanggal 1 Agustus 1913. Kebijakan Oga Ngole dalam bidang keagamaan, pada masa pemerintahannya, menerima dengan baik kedatangan para pastor yang mengajarkan agama Katolik sebagai bukti Keluarga Raja sebagai orang-orang yang dipermandikan oleh Mgr. Noyen dan bukti lain yaitu Paroki St. Fransiskus X. Boawae yang didirikan pada tahun 1915.

Masuknya agama Katolik di Boawae awalnya di bawah oleh Mgr. Noyen, yang pada tanggal 17 Oktober 1915 dengan menggunakan kapal dari Ende menuju Aimere. (Dopo dkk, 2015: 45). Setibanya di Aimere, terdapat 28 anak yang sudah siap dipermandikan oleh guru-guru dari sekolah Katolik di sana, lalu melanjutkan perjalanan ke Bajawa dan terus ke Boawae. Di Boawae Ia mempermandikan 10 orang anak yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru di SRK Boawae yang terdapat dalam catatan Mgr. Noyen. (Dopo dkk, 2015: 45). Anak-anak yang dipermandikan oleh Mgr. Noyen pada tanggal 21 Oktober 1915 ini menurut daftar di Buku Induk Paroki Boawae adalah sebagai berikut: Melkhior Baru asal Boawae, Katharina Ngoe Meze (putri Oga Ngole), Maria Margaretha Buju (putri Oga Ngole), Ignatius Tangi asal Djowolo, Anton Bata Mude, Fransiskus Muga asal Djowolo, Yakobus Dala asal Wolobidi, Yohanes Dai asal Wolobidi, Fransiskus Wae Mala asal Wolobidi, Yosef Djuwa Dobe Ngole yang dipermandikan pada tanggal 13 Agustus 1916.

Dalam bidang militer pada masanya terdapat sekutu adat dalam perang yang disebut dengan *Pala Bani* dan *Pala Aku*. *Pala bani* merupakan sekutu perang yang berasal dari wilayah lain dalam radius Kerajaan Nage. Sedangkan *Pala Aku* merupakan sekutu perang dari wilayah Kerajaan di Flores dalam konteks ini adalah wilayah Ende dan Lio. Ada-pun

perang Kerajaan Nage melawan Belanda terjadi pada tahun 1916 sampai tahun 1917. Adanya peninggalan dari raja Oga Ngole berupa senjata laras panjang di rumah adat Tiwu Deu yang sudah berumur ratusan tahun yang sudah amat lapuk. Fakta ini menunjukkan bahwa pada masanya telah ada transaksi jual beli senjata.

3. Biografi Raja Oga Ngole

Oga Ngole adalah seorang pria pemberani yang berasal dari bangsawan Suku Deu. Ia terlahir dari rahim seorang Ibu yang juga merupakan keturunan bangsawan saudari dari Ebu Sekke Liu yaitu Ine Ngole Mola dan ayahnya adalah seorang bangsawan suku Deu yaitu Dapa Gu. Ia memiliki 3 orang saudari yaitu Ine Awi Ngole, Ine To Ngole dan Ine Doa Ngole. Tempat dan tahun kelahirannya tidak diketahui dengan jelas karena, pada zaman tersebut masih sangat primitif dan masyarakat tidak mengenal tulisan. Sebelum Oga Ngole menjadi Raja, Ia sudah terkenal dengan kelihaiannya dalam berburu. Oga Ngole memiliki 5 istri dan dikarunia 11 anak. Putra-putri dari Oga Ngole Ame Teda Sada, Ame Gogo, Ine Dede Meze, Ine Buju Idi, Bapak Yosef Djuwa Dobe Ngole, Ine Ngoe Meze, Ine Nuba Ede, Ajo Bupu, Kornelis Kota Kile, Hendrikus Watu Mite, dan Anastasia Ia Mite.

Pada tahun 1916 sampai dengan 1917 Roga Ngole memimpin perang melawan Belanda namun akhirnya Nage ditaklukan oleh Belanda. Pada tahun 1917 Kerajaan Nage dibentuk sebagai *Zelfbestuur Landschap* yang ditetapkan melalui dokumen *Korte Verklaring* dengan keputusan pemerintah Hindia-Belanda pada 28 November 1917 No.57, *Korte Verklaring* yang sah diabaikan dan akhirnya dengan keputusan 3 Agustus 1918 No.5477/15 diberlakukan, maka Oga Ngole mulai menjalani tugas kepemimpinannya di Nage sesuai dengan kebijakan Belanda. Selama 10 tahun Oga Ngole menjalankan pemerintahannya pada Kerajaan Nage dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 di Rumah Sakit Ende Sang Raja kembali ke pangkuan yang Kuasa karena mengalami sakit, digantikan dengan anaknya Yosef Djuwa Dobe Ngole.

D. Penutup

Sejarah merupakan eksistensi dan jati diri dari suatu bangsa dan sejarah adalah tempat pijakan dari generasi ke generasi dalam melihat masa depan. Kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Nage merupakan kehendak dari Tuhan, dimana kedatangan mereka banyak membawa perubahan dalam Kerajaan. Nage yang sebelumnya masih hidup dalam

kelompok-kelompok suku yang sering disebut *Ili Woe*, *Ulu Eko* dan *Bo 'a Ola* perlahan-lahan berubah menjadi satu kesatuan yang lebih terstruktur. dalam sebuah kesatuan pemerintahan wilayah yang dipimpin oleh seorang Raja. Secara tradisional masyarakat Nage sebelum kedatangan Belanda sudah mengenal sistem pemerintahan tradisional untuk tugas dan kepemimpinannya dalam wilayah adat masing-masing, yang berlangsung hingga pada tahun 1907.

Dalam ke pemerintahannya pendidikan dan agama Katolik sudah diterima dengan baik oleh Raja Oga Ngole, sehingga sudah ada rakyat yang sekolah dan dipermadikan. Sekolah yang didirikan pada masa kolonial Belanda adalah SRK Boawae yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1913 dan gereja didirikan pada tahun 1915. Kebijakan Belanda misalnya Kerja rodi dan sistem pajak merupakan sebuah sistem yang merugikan rakyat, akan tetapi hasil dari ini dapat kita nikmati di zaman ini misalnya jalur jalan raya yang kita lihat sekarang merupakan satu fasilitas untuk menghubungkan kita dengan wilayah lain.

Adapun kebijakan lain dari Belanda yang meliputi pendirian sekolah bagi rakyat ini merupakan suatu dorongan terbesar bagi masyarakat tradisional untuk mengenal tentang ilmu membaca dan menulis, ini merupakan aspek positif dari kebijakan-kebijakan Belanda. Kolonialisme dan Imperialisme Belanda memang terlihat buruk dalam cerita kehidupan rakyat di masa lampau, sampai terjadinya perang dan pemberontakan dari rakyat yang mengisahkan perjuangan penolakan mereka terhadap kedatangan Belanda. Kerja rodi dan sistem pajak, merupakan sebuah permasalahan besar pada masa kolonial Belanda karena merugikan masyarakat dan memakan korban jiwa. Segala bangunan buat: Kolonial Belanda menjadi saksi bisu dari eksistensi pemerintahan Belanda di Nage.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, R. M. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LKiS.

AM, S. 2004. *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Notosusanto, N. (2006). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Palmer, R. L. (2003). *Hermeutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonom Universitas Indonesia.
- Suparno. (2004). *Pengetahuan Sosial Sejarah*. Surakarta: PT.Pabelan.
- S. T. Andreas. (2006). *Etnologi Dan Tugas Perutusan*. Ende: Nusa Indah.
- Surakhmand, W. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Transito.
- Doredae, A. (2004). *Ngada Membangun*. Maumere: Ledalero.
- Kadju, Y. (2018). *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Ngada Sebuah Pendekatan Historis Kronologis*. Ende: Nusa Indah.
- Sa'u, A. T. (2006). *Etnologi Dan Tugas Perutusan*. Ende: Nusa Indah.
- Forth, G. (2010). *Di Kaki Gunung Ebulobo Agama, Kosmologi, dan Klasifikasi Makhluk Hidup Pada Masyarakat Nage*. Mbay: Bappeda Nagekeo.
- Pr, f. D. (2015). *Kenangan 75 Tahun Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae*. Boawae: Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae.
- Ardhana, I. K. (2005). *Penataan Nusa Tenggara Timur Pada Masa Kolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pr, f. D. (2015). *Kenangan 75 Tahun Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae*. Boawae: Paroki St. Fransiskus Xaverius Boawae.
- Yohane V. Sayangan, dkk. (2019). *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Ngada Sebuah Pendekatan Historis-Kronologis*. Ende: Nusa Indah.
- M. Widiyatmaka, d. T. (1977/1978). *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sistem pemerintahan awal di Indonesia. Tersedia pada: [https:// moondoggiesmusic.com/sistem-pemerintahan-indonesia/](https://moondoggiesmusic.com/sistem-pemerintahan-indonesia/). Diakses pada tanggal 10 Desember 2018. Pada jam 18.00 WITA.

- Diakses pada: <https://www.ruangguru.co.id/kerajaan-monarki-pengertian-jenis-gelar-dan-penguasa-di-indonesia-terlengkap/>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018. Jam 18:00.
- Diakses pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Belanda. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018. Jam 18:00.
- Diakses pada: <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/flores/nagekeo-kerajaan/>. Pada tanggal 12 Desember 2018. Jam 15:00
- Diakses pada: <https://indoprogress.com/2017/02/penjajahan-dan-land-grabbing-sebagai-akumulasi-melalui-perampasan-di-flores/>. Pada tanggal 12 Desember 2018. Jam 15:00.
- Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Era Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. Diakses pada : <https://media.neliti.com/media/publications/12292-ID-corak-budaya-birokrasi-pada-masa-kerajaan-kolonial-belanda-hingga-di-era-desentr.pdf>. tanggal 18 Januari 2020. Jam 08:00.
- Tingkatan sosial masyarakat. Diakses pada: https://repository.usd.ac.id/27345/2/024314021_Full%5B1%5D.pdf. Tanggal 9 Januari 2020. Jam 19:30.
- Peo catatan kecil Cyrilus Bau Engo. Diakses pada: <http://cylbauengo.blogspot.com/2016/12/peo.html>. Tanggal 07 Januari 2020. Jam 16:00.